

mengatakan bahwa pendidikan harus menjadi komponen penting dari rekomendasi-rekomendasi tersebut.

**Leaf:** Saya memiliki satu hal lagi yang ingin saya kemukakan bahwa saya merasa ada sesuatu yang hilang dalam presentasi-presentasi pagi ini. Banyak orang berkomentar bahwa dalam politik Indonesia yang baru ada peningkatan kekuasaan pada sisi legislatif dan tidak ada orang yang benar-benar tahu tentang masa depan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Apa yang mengagetkan saya tentang diskusi tersebut sejauh ini adalah bahwa belum ada penjelasan tentang yudikatif. Dalam demokrasi di Barat, yudikatif yang independen sering memainkan peran mediasi dalam menyeimbangkan kekuasaan pemerintah. Dan saya akan berpikir bahwa dalam konteks Indonesia hal ini memunculkan pertanyaan tentang bantuan seperti apa atau jenis bantuan apa yang dapat diberikan untuk meningkatkan independensi yudikatif. Saya yakin bahwa telah ada banyak program di Indonesia, tetapi saya tidak tahu program-program Kanada secara khusus. Saya mengatakan hal ini bukan karena saya mencoba untuk menemukan hal-hal yang baru untuk keterlibatan CIDA, tapi mungkin ada organisasi-organisasi lain di Kanada, apakah itu dalam masyarakat madani atau sebagai bagian dari pemerintah propinsi atau nasional, yang mungkin memiliki ketertarikan dalam mendukung reformasi yudikatif atau peningkatan independensi yudikatif di Indonesia. Karena itu saya ingin memastikan bahwa hal ini tercatat karena saya kira pasti ada beberapa potensi untuk mengembangkan sesuatu yang sejalan dengan hal ini. Terima kasih.

**Moderator:** Jika saya boleh memberikan sedikit komentar mengenai masalah kelembagaan ini, saya telah melakukan beberapa penelitian tentang sistem yudikatif di Indonesia. Salah satu masalah yang muncul di Indonesia selama dua atau tiga tahun ke belakang adalah menjamurnya dan tumpang tindih fungsi dalam sistem yudikatif. Kita sekarang memiliki Mahkamah Konstitusi, kita memiliki komisi Ombudsman, dan kita juga akan segera memiliki komisi kebenaran dan rekonsiliasi untuk menangani masalah-masalah pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu, tapi pada saat yang bersamaan kita masih memiliki pengadilan reguler, dan pengadilan *ad hoc* untuk pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Ini sangat membingungkan masyarakat; jika mereka memiliki keluhan, ke mana mereka harus pergi? Saat ini banyak pengadilan di Indonesia, sehingga diperlukan penanganan masalah fungsi yudikatif. Saya